

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kasmir (2018:7), pengertian laporan keuangan adalah Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Selanjutnya, laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, namun juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan analisis kinerja keuangan. Melalui hasil analisis tersebut, dapat diketahui penggunaan sumber – sumber ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, serta hasil yang telah dicapai perusahaan tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, instansi wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna, 2013)

Laporan Keuangan yang disajikan oleh instansi harus berkualitas, karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang di publikasikan oleh instansi dengan kegunaan yang berbeda-beda.

Pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam prose donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran–ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat penting mengingat kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Selain itu sumber daya manusia yang berkualitas tinggi bermanfaat dalam penyesuaian gerak atas perubahan iklim usaha yang begitu cepat. Bila suatu organisasi/perusahaan telah mempunyai strategi dan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan sumber daya manusia apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dimensi yang paling penting dalam merealisasikan tujuan organisasi adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Proses dari sumber daya manusia pada instansi pemerintahan seperti sulitnya mengatur pegawai dan ketidaksamaan keinginan antara atasan dan pegawai itu sendiri harus diatasi dengan cara memberikan pengetahuan tentang keorganisasian dan pelaksanaan kerja, hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi para pegawai untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan secara efektif dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mencapai Sumber Daya Manusia yang efektif dan optimal tidak terlepas dari proses pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri yaitu mulai dari perencanaan sumber daya manusia, apakah sumber daya tersebut sebanding jumlahnya dengan beban pekerjaan yang ada, apakah proses rekrutmen dan seleksinya telah sesuai untuk memperoleh pegawai yang memenuhi kualifikasi sebagai pegawai. Selain itu bagaimana dalam pengembangan dan evaluasinya seperti penilaiannya apakah sudah sesuai, pelatihan apa yang diperlukan bagi pegawai tersebut, sistem penilaian kinerjanya, serta pengembangan karir pegawai tersebut.

Kompetensi selalu mengandung maksud dan tujuan yang merupakan dorongan motif atau *trait* yang menyebabkan suatu tindakan untuk memperoleh hasil kinerja yang baik. Pengaruh sumber daya manusia pada kinerja dapat dilihat dari tingkat kompetensinya yang mempunyai implikasi praktis dalam perencanaan sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari gambaran bahwa kompetensi

pengetahuan dan keahlian cenderung lebih nyata dan relatif berada di permukaan salah satu karakteristik yang dimiliki pegawai.

Sumber daya manusia itu merupakan pilar dari penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Rahayu, dkk (2014) Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat dari kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Sutabri (2014:3) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Banyak hal positif yang akan didapatkan dari adanya teknologi informasi, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah, terlebih lagi jika teknologi informasi yang tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi sia-sia dan semakin memperbesar biaya yang akan dikeluarkan. Adanya kendala dari penerapan teknologi informasi antara lain : (1) Berkaitan dengan kondisi perangkat keras, (2) Perangkat lunak yang digunakan, (3) Pemutakhiran data, (4) Kondisi sumber daya manusia, (5) keterbatasan dana. Dengan kendala itu dapat menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah belum optimal.

Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tingginya kualitas laporan keuangan instansi juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian intern yang dimiliki oleh institusi instansi itu sendiri. Jika Pengendalian Intern yang lemah dapat menyebabkan sulitnya untuk mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2010). Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik dapat mencegah terjadinya penyelewengan atas persediaan yang akan merugikan perusahaan sedini mungkin. Salah satu syarat agar pengendalian internal berjalan dengan baik yaitu tidak boleh ada seseorang yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan untuk melakukan semua fase kegiatan operasional.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 : (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan pengawasan Intern. Namun, yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan pengelolaan keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran belanja yang tersedia, sementara penerima anggaran harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Menurut Armando (2013) untuk mewujudkan integritasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus – menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, juga diperlukan pola pikir (*mind set*)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Walter (2012: 233) pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang diimplementasikan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi, serta dirancang untuk memenuhi lima tujuan berikut:

1. Menjaga aset. Perusahaan harus menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan
2. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan. Semua orang dalam organisasi – manajer dan karyawan – harus bekerja mampu mencapai tujuan yang sama.
3. Mempromosikan efisiensi operasional. Perusahaan tidak boleh memboroskan sumber dayanya. Perusahaan bekerja keras untuk melakukan penjualan, dan tidak menia-nyiakkan setiap manfaat yang ada.
4. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Catatan yang akurat merupakan hal yang penting. Tanpa pengendalian yang memadai, catatan mungkin tidak dapat diandalkan, yang membuatnya tidak mungkin menyatakan bagian dari perusahaan yang menguntungkan dan bagian mana yang memerlukan perbaikan.
5. Menaati persyaratan hukum. Jika mengabaikan hukum, perusahaan akan dikenai denda, atau kasus yang ekstrem, eksekutif puncaknya mungkin saja masuk penjara. Pengendalian internal yang berefektif akan membantu memastikan ketaatan terhadap hukum dan membantu menghindari kesulitan hukum.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bagan yang mengurus kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten OKI, sebelum di audit BPKAD OKI mengolah masalah keuangan daerah, meringkas, dan merangkum laporan keuangannya. lalu, setelah diperbaiki secara benar laporan tersebut baru bisa di serahkan kepada BPK. BPK akan mengoreksi laporan keuangan tersebut apakah sudah baik atau belum sehingga jika BPKAD OKI mengolah laporan keuangan dengan baik maka BPKAD OKI akan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Jika pemerintah OKI mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti kualitas dari Laporan Keuangan pemerintah ini sudah baik yang menandakan bahwasannya BPKAD OKI telah melakukan penyusunan kualitas laporan yang bagus untuk pelaporan

pemerintahan daerah nya. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKI maka dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Hal ini merupakan suatu Prestasi yang didapatkan bagi Pemerintah Kabupaten OKI.

BPKAD OKI telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2011 sampai 2021. Untuk lebih jelas bisa dilihat di tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kabupaten OKI

Tahun Anggaran	Opini BPK
2011	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2012	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2013	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2014	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2015	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2016	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2017	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2018	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2019	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2020	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
2021	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Tahun Anggaran 2011-2021

Selain itu, yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI dalam mengolah laporan keuangannya sudah memakai aplikasi SIMDA sedangkan di Permendagri No 70 tahun 2019 sudah diwajibkan untuk memakai Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sehingga, pegawai BPKAD OKI sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai aplikasi terbaru tersebut. Sumber daya manusia di BPKAD OKI sudah dapat dikatakan berkualitas dikarenakan pegawai di BPKAD OKI sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan mengolah laporan keuangan nya sehingga kecepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan dan optimalnya koordinasi sesama pegawai terhadap penyelesaian suatu pekerjaan. Jadi, sumber daya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD OKI) dapat dikatakan berkompeten dalam

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI telah menggunakan aplikasi yang sesuai dengan peraturan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI juga sudah menerapkan penjadwalan untuk pemeliharaan komputer secara teratur serta dilakukannya juga pendataan jika komputer yang telah usang tepat pada waktunya. Lalu untuk jaringan internet juga sudah sangat memadai sehingga dapat sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan. Untuk teknologi informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI sudah dapat dikatakan baik dan berkualitas.

Hal terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan hasil observasi, BPK menemukan temuan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) OKI dimana bangunan bahan-bahan fisik tidak sesuai dengan RAB. Akan tetapi dengan kelemahan tersebut BPKAD OKI langsung ditindak lanjut oleh BPK atau koreksi BPK langsung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai dikarenakan terkadang pimpinan melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap catatan akuntansi sehingga kesalahan yang pernah terjadi dapat dinetralisir agar tidak terulang kembali.

Jefry Gasperz (2019) telah melakukan penelitian adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ppada Badan Pusat Statistik Maluku. Kemudian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik wilayah Maluku. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku. Begitu juga dengan Sundari & Rahayu (2019) yang melakukan penelitian hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif yang telah

dilakukan, menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik dengan masing-masing skor rata-rata sebesar 86%, 85%, dan 86%. Untuk Sistem Pengendalian Intern memiliki kategori baik yaitu dengan skor rata-rata sebesar 86%. Dari hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Bandung. Kemudian dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Bandung, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Bandung.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Jefry Gasperz (2019) dengan judul penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik wilayah Maluku) dan Sundari & Rahayu (2019) dengan judul penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018).

Dari penjelasan diatas, maka untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Batasan Masalah

Disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam diri penulis baik menyangkut kemampuan, waktu, maupun dana dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi di atas penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ogan Komering Ilir.

1.3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah dengan mengetahui dan menguji secara empiris :

1. Untuk mengetahui apakah Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk mengetahui apakah Pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

1.4.2 Manfaat Penelitian

1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan dari informasi yang didapat lalu digunakan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan melalui pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat terpenuhi dan tercapai

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu wawasan mahasiswa/i dalam berfikir dan manfaat ini bisa berguna untuk memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan yang berkepentingan serta untuk menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.